

TESIS

**Pertimbangan Penyidik Di Polda Daerah Istimewa
Yogyakarta Dalam Pemberian Assessment Terhadap
Tersangka Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika**



Albertus Ismoko tri Handoyo

No. Mhs.:165202515/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2018







KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis unjukan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh alam raya jaga semesta untuk segala berkat dan nikmatnya, dengan karunia serta rahmatnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul :“ Pertimbangan Penyidik di Polda D.I.Yogyakarta Dalam pemberian Assessment Terhadap Tersangka Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian sidang tesis pada Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan yang sangat bernilai bahkan tidak ternilai bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhantanto, S.H. LL.M. Selaku Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta dan Dosen penulis di Magister Hukum Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta;
2. Ibu G.arum Yudarwati, SIP, .M.Mktg. Comm, Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Hyronimus Rithi, S.H.,LL.M . selaku Ketua Program dan Dosen penulis di Magister Hukum Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta;
4. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan mentor penulis di Magister Hukum Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta;

5. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II dan Dosen penulis di Magister Hukum Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta;
6. Bapak Dr. Al.Wisnubroto, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji dan Dosen penulis di Magister Hukum Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta;
7. Ibu Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum. selaku dosen penulis
8. Bapak Komisaris Polisi Sugeng Riyadi. selaku Kepala Satuan Reserse Narkoba Polisi Resor Kota Yogyakarta, yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi dalam penyusunan tesis ini.
9. Ibu AKP. Endang Sulistiandini, S.Psi, selaku Perwira Urusan Analisa dan Evaluasi Kepolisian Daerah (POLDA) Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah memberikan penjelasan terkait penulisan tesis ini.
10. Bapak Inspektur Satu Yulianto, selaku Kepala urusan Pembinaan dan Operasional Polisi Resor Sleman yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait penulisan tesis, sehingga dapat berjalan dengan baik.
11. Bapak Inspektur Dua Fajar Yuliyanto, S.H, MM selaku Kepala urusan Pembinaan dan Operasional Polisi Resor Kulon Progo, yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait penulisan tesis, sehingga dapat berjalan dengan baik.
12. Bapak Pramana, Kepala Bagian penindakan BNNP D.I. Yogyakarta yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait penulisan tesis, sehingga dapat berjalan dengan baik.

13. Bapak Philipus Haryadi, yang telah membantu penulis dalam menempuh dan menyelesaikan tesis ini.
14. Yang Terhormat seluruh Dosen pengajar serta staff pengelola dan administrasi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta;
15. Untuk seluruh keluarga besar penulis, terkhusus untuk Istriku Lidia Eko Srituaningsih SE., Anakku Gregorius Kidung Sukmo Aji, Brigita Nilam Kinanthi, kedua orang tua ku, Mertuaku, teman, rekan, terima kasih atas doa dan dukungannya;
16. Sahabat-sahabat penulis dalam penulisan, terkhusus Angkatan Agustus 2016 MIH UAJY, HIMMAKUM MIH-UAJY, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam menyelesaikan tesis ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dan dengan segala kerendahan hati, penulis menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun demi menyempurnakan tesis ini.

Yogyakarta, 12 Maret 2018

Albertus Ismoko Tri Handoyo

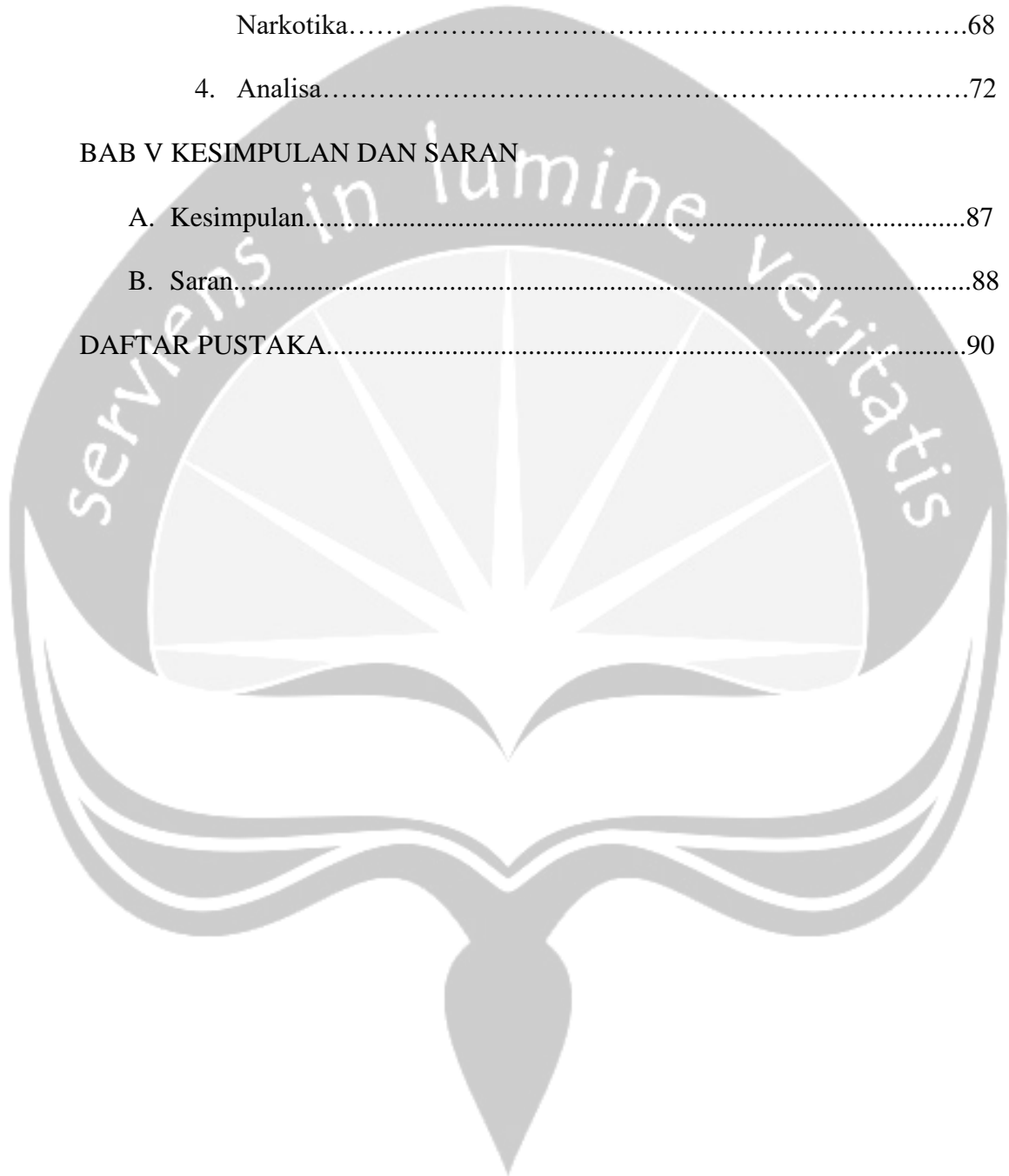
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL DAN BAGAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tugas, Kewenangan dan Kebijakan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum.....	16
1. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia.....	16
2. Kebijakan Hukum Polri dalam Penegakan Hukum.....	21
B. Pemberian Assessment dalam Tindak Pidana Narkotika	24
1. Pengertian Narkotika dan Jenis Narkotika.....	24

2. Pengertian Tindak pidana Narkotika.....	26
3. Penegertian Assessment.....	28
4. Assessment Dalam Tindak Pidana Narkotika.....	29
C. Landasan Teori	
1. Teori Kebijakan Anderson	31
2. Teori Penegakan Hukum Lawrence Friedman.....	33
D. Batasan Konsep.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Data.....	38
1. Bahan Hukum Primer.....	38
2. Bahan Hukum Sekunder.....	40
D. Metode Pengumpulan Data.....	41
1. Studi Kepustakaan	41
2. Wawancara.....	42
E. Metode Analisa data.....	42
1. Data Sekunder	
a. Bahan Hukum Primer.....	42
1. Deskripsi.....	42
2. Sistematisasi.....	43
3. Analisa Hukum Positif.....	44

4. Interpretasi Hukum.....	44
b. Bahan Hukum Sekunder.....	45
F. Pendekatan.....	45
G. Landasan Teori	46
H. Proses Berfikir	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Keberadaan Aturan Hukum Positif Dalam Menunjang Pertimbangan Penyidik di Polda D.I.Yogyakarta Dalam Pemberian Assessment Terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika	47
1. Berbagai Aturan Hukum Positif Yang Dapat Diterapkan Dalam Pemberian Assessment Terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika	47
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	47
b. Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	51
B. Implementasi Aturan Hukum Positif Penyidik di Polda D.I.Yogyakarta Dalam Pemberian Assessment Tindak Pidana Narkotika.....	51
1. Pertimbangan Penyidik Di Polda D.I.Yogyakarta dalam Pemberian Assesment Bagi Tersangka Tindak Pidana Narkotika.....	52
2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Penyidik di Polda D.I.Yogyakarta Dalam Memberikan Assesment Tersangka Penyalahgunaan Tidak Pidana Narkotika.....	59

3. Kebijakan Penyidik Di Polda D.I.Yogyakarta Terhadap Assessment Itu Dirumuskan Kepada Tersangka Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika.....	68
4. Analisa.....	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90



ABSTRAK

PERTIMBANGAN PENYIDIK DI POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMBERIAN ASSESSMENT TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Oleh : Albertus Ismoko Tri Handoyo

Maraknya peredaran narkotika dan jenis baru narkotika, merupakan tantangan bagi BNN dan Polri dalam memberantas, penanggulangan narkotika. Salah satu upaya negara menekan peredaran narkotika, melalui BNN dan Polri serta peran serta masyarakat dalam menanggulangi, memberantas peredaran narkotika. Korban penyalahgunaan narkotika dan peandu narkotika saat ini mendapatkan kesempatan melakukan rehabilitasi, baik medis maupun sosial melalui assessment. Bagi Korban Penyalahgunaan dan pecandu narkotika wajib mendapatkan assessment, sesuai Pasal 54 dan 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini dilakukan secara normative dengan metode pendekatan sejarah hukum dan politik hukum, sehingga mengetahui permasalahan dalam pemberian assessment, baik dari pertimbangan, kendala dan kebijakannya. Pemerintah melakukan penegakan hukum dengan mengubah hukuman penjara (penal) menjadi rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika, yang membuat kesan lebih manusiawi. Korban penyalahgunaan narkotika berhak mengajukan permohonan assessment melalui keluarga, penasehat hukum, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau persidangan (terdakwa) melalui jaksa atau hakim. Syarat dikabulkannya assessment 1) tertangkap tangan, 2) barang bukti kurang dari 1 gram, 3) positif menggunakan narkotika, 4) tidak terlibat jaringan narkotika, bukan pengedar dan bandar narkotika. Langkah pemerintah disatu sisi membuka pintu untuk tersangka mensiasati mendapatkan assessment untuk menghindari hukuman penjara, disatu sisi penegakan hukum yang tegas terasa berkurang dengan program rehabilitasi ini.

Kata kunci : assessment, korban penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi.

ABSTRACT

SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA'S CONSIDERATION POLICE INVESTIGATORS IN GIVING ASSESSMENT OF SUSPECTED NARCOTIC CRIMINAL

By : Albertus Ismoko Tri Handoyo

Rampant circulation and new types of narcotics, is a challenge for BNN and police in countermeasures to combat narcotics. One of the efforts of the state to suppress the circulation of narcotics, through BNN, Polri and community participation in tackling, eradicating the narcotics. Victims of narcotics abuse and narcotics addicts now have the opportunity to rehabilitate both medical and social through assessment. Abuse and drug addicts shall be assessed, in accordance with articles 54 and 127 subsection (3) No. 35 of 2009 on Narcotics. This research is done normatively with legal story and legal approach, so that the problem in assessing, both from consideration, the obstacle and the policy. The government enforce the law by converting prison sentence into rehabilitation for victims of drug abuse which makes the impression more humane. Narcotics abuse victims are entitled to file family appraisals, lawyer, whether at the level of investigation, prosecution or trial (defendant) through the prosecutor or judge. Conditions for grading assessment 1) caught, 2) evidence less than 1 gram, 3) positive using narcotics, 4) not involved narcotics networks, not narcotics and the drug dealers. Government measures on the side open the door for suspects to anticipate getting assessed to avoid imprisonment, on the one hand a firm law enforcement feels diminished with this rehabilitation program.

Keywords: Assessment, Victims of narcotics, Rehabilitation